



**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TRIWULAN III TAHUN 2021**

**STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Kata Pengantar

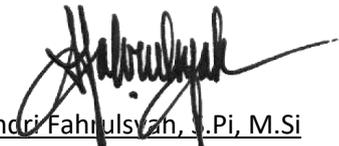
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2021 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan III Tahun 2021 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2021 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 14 Oktober 2021

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsvan, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2021, Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 7 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; ⁽²⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dan ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2021, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 20 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan III Tahun 2021, dari 20 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 9 (sembilan) IKU berstatus Putih (tidak ada skor), IKU berwarna kuning 1 (satu) serta 10 (sepuluh) IKU berwarna hijau (terealisasi 100%).

Realisasi anggaran tahun 2021 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 30 September 2021 sebesar **76,77%** atau sebesar Rp **37.951.614.828,-** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 49.438.013.000,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*). Anggaran pada TW III tersebut telah mengalami revisi pada bulan Agustus 2021, dimana anggaran sebelum revisi adalah sebesar Rp. 51.048.535.000,-. Melalui Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2021.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual.....	4
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB III PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 - 2024.....	6
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021.....	12
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.....	12
B. Analisis Pencapaian Kinerja	155
1. Sasaran Program 1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	Error! Bookmark not defined.5
2. Sasaran Program 2 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	Error! Bookmark not defined.6
3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat..	33
4. Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	34
5. Sasaran Program 5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	Error! Bookmark not defined.6

6. Sasaran Program 6 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	40
7. Sasaran Program 7 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP....	43
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
LAMPIRAN	52

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.....	10
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021	122
Tabel 1. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawa. Error! Bookmark not defined.	6
Tabel 2. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	17
Tabel 5. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	17
Tabel 6. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 7. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan..... Error! Bookmark not defined.	1
Tabel 8. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Perikasa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat.....	27
Tabel 11. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat.	29
Tabel 12. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat.	30
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat.....	31
Tabel 14. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada SDKP TW III Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15. Capaian IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	38
Tabel 37. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	38
Tabel 48. Capaian IKU “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”	39
Tabel 19. Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”	40

Tabel 20. Data Kasus TPKP Yang Ditangani Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2021.....	41
Tabel 21. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO TW III Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	44
Tabel 22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI TW III Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	45
Tabel 23. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari–September 2021.....	50

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	2
Gambar 2. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	35
Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat.....	36
Gambar 4. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	42
Gambar 5. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam

rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam

menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/ 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Masih dijumpai kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau Alat Tangkap Terlarang seperti penggunaan Trawl;
2. Masih terjadi konflik antar nelayan berhubungan dengan alat tangkap dan daerah penangkapan;
3. Terjadinya degradasi lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun) akibat aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).
4. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
5. Kurangnya armada speedboat untuk patroli disebabkan pada tahun 2019, 1 Unit Speedboat Dolphin 005 telah di lelang.
6. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan;

7. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan (oleh industry unit pengolahan ikan).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab III Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2021; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

- A. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- B. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- C. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
- D. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- E. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan

keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:

- a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah

untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2021 berjumlah Sasaran Kegiatan (SS) 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 20 (Dua Puluh) pada tahun berjalan terdapat perubahan Kebijakan penganggaran dan perencanaan kinerja sehingga PK harus dilakukan penyesuaian. PK hasil revisi pada bulan Februari tahun 2021 karena adanya Revisi Penghematan Anggaran tanpa merubah Jumlah Sasaran Kegiatan ataupun Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan terjadi hanya karena perubahan Anggaran. Pada bulan Agustus 2021, terjadi refocusing anggaran dari Rp. 51.048.535.000 menjadi Rp. 49.438.013.000. Adanya revisi anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya revisi target pada IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dan IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya sebelum dan sesudah revisi pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Sebelum Revisi	Target Sesudah Revisi
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,81	1,8
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,11	0,04
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil	80	80

		Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)		
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90	90
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	72,5
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	72,5
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84	84
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89	89
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86	86

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (Dua puluh) IKU. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 6. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET TW III	REALISASI TW III	PERSENTASI
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	75	80	106,67
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	96,29	96,29
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	71	71	100
4.	Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,8	1,09	1,71	120
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed	0,04	0,03	0,032	108

		Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	0	0	
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	0	0	
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	65	98,75	120
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	50	96,88	120
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80	91,24	114,05
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar	80	80	90,2	112,75

		Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)				
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75	0	0	
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73	0	0	
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90	0	0	
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	0	0	
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	0	0	
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84	84	98,89	117,73
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89	0	0	
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86	0	0	

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor ≥ 100)
2		Hati-hati ($80 \leq \text{Skor} < 100$)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode Triwulan III Tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 (lima) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: ⁽¹⁾ Presentase Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽²⁾ Presentase Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽³⁾ Presentase Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁴⁾ Presentase Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁵⁾ Presentase Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk mengukur capaian IKU **Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan** dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 7.Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada TW III tahun 2021 IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan presentase 75% kepatuhan pelaku usaha. Capaian pada TW III melebihi dari yang ditargetkan yaitu dengan capaian 80% pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya dengan persentase capaian 106,67%. Jumlah pelaku usaha kelautan yang di periksa pada TW III tahun 2021 sebanyak 14 pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha kelautan yang di periksa pada TW III Tahun 2021 tersebut sedikit bila di bandingkan dengan jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa pada TW III tahun 2020 yaitu sebanyak 18 pelaku usaha. Berkurangnya pelaku usaha yang di periksa pada TW III tahun 2021 ini di bandingkan dengan TW III Tahun 2020, karena pada tahun 2021, covid-19 semakin meningkat penularannya sehingga dalam menjalankan pengawasan di lakukan secara hati-hati dan dengan prokes yang ketat.

IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pencapaian IKU Presentase pelaku usaha kelautan yang di periksa kepatuhannya pada TW III tahun 2021 tidak dapat di bandingkan dengan capaian TW III tahun 2020, karena pada TW III tahun 2020 IKU tersebut berupa “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan” sementara pada TW III tahun 2021 IKU berupa “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”. Capaian IKU ke-1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 8. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			
	TARGET	TARGET TW III	REALISASI	PRESENTASE (%)
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	75	80	106,67%

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW III tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 1 pelaku usaha kategori “**Taat**” Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
Bapak Rozali	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan bersama - sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Riau (UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II); - Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) unit kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) dan ditemukan 1 (satu) pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan terubuk yaitu bapak Rozali dengan alasan ekonomi; - Kepada bapak Rozali diberikan Surat Peringatan pertama dan membuat Surat Pernyataan tidak melakukan penangkapan sesuai dengan Kepmen KP No. KEP.59/MEN/2011; - Nelayan lainnya yang diperiksa adalah Azmi, Muhammad Naim, Wira, Juandi Saputra dan Mansur;

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tangkap yang digunakan adalah Gillnet; - Pengawas Perikanan memberikan sosialisasi Kepmen Kepmen-KP No.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) kepada para nelayan.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan TW III ini adalah sebesar Rp. 23.801.184 atau 95,20%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 95,20%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

b. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 4 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
1	Wisata Bahari Pantai Jono (Koperasi Masyarakat Pantai SuJono)	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata ini terletak di Dusun Mesjid Timur, Kel. Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, Prov. Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 03°23'11.6"LU 099°24'40.7" BT; - Pengawasan dilakukan dengan pendampingan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Batubara (Kabid Pariwisata Bapak Fahrizal Abdi); - Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada : Koperasi Masyarakat Pantai Jono dengan nomor NIB 8120201982453. Luas lahan 10 Ha dan jenis kegiatan objek wisata pantai. Diterbitkan pada tanggal 25 September 2018; - Izin Pengelolaan diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Nomor 556/443/DISPORAPAR/2020 kepada Koperasi Masyarakat Pantai Sujono (KMPJ) terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 s/d 27 Agustus 2023; - Pengelolaan pantai Jono saat ini diambil alih oleh pemerintah kabupaten Batubara sejak 18 Juli 2021 karena adanya permasalahan manajemen yang terjadi di koperasi Masyarakat Pantai Jono; - Pada saat pelaksanaan pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumberdaya perikanan dan lingkungannya.
2	Wisata Bahari Pantai Serambi Deli, Desa Paluh Sebaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama)	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Serambi Deli dibuka pada tahun 2015 pada awalnya dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Paluh Sebaji. Kemudian pada tahun 2017 dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama. Pengawas lokasi dilakukan oleh bapak Abdul Hamid selaku badan pengawas BUMDES. - Perizinan diberikan oleh Kepala Desa Paluh Sebaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang; - Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran ataupun dampak kerusakan lingkungan yang signifikan dari kegiatan wisata bahari yang diawasi.
3	Wisata Bahari Pantai Muara Indah, Desa Denai Kuala, Kec. Pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata bahari yang diawasi adalah Pantai Muara Indah yang terletak di Desa Denai Kuala, Kec. Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terletak pada titik koordinat 3 40'30. 756" N - 98° 56'37.6188" E;

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Kelompok Kemitraan Lingkungan Muara Indah Jaya Mandiri Desa Denai Kuala)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Pantai Muara Indah ini memiliki dokumen izin Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara KPH Wilayah I Stabat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Kelompok Kemitraan Lingkungan Muara Indah Jaya Mandiri Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan nomor pihak pertama 074/0138 dan Nomor pihak kedua 01/MIJM-DK/I/2019; - Pantai Muara Indah memiliki luas area 1.200 km² dengan panjang 4000 m dan garis pantai yang dimanfaatkan ±2000 m.
4	Wisata Bahari Pantai Ketapang, Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sungai Cingam)	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Ketapang merupakan sebuah destinasi alam bahari yang berada di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tepatnya pada titik koordinat 01°58'32,56968"LU - 101°46'24,8466"BT; - Pantai ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sungai Cingam Jaya; - Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan wisata bahari.

Realisasi anggaran s/d 30 September 2021 sebesar Rp.33.435.630,-(57,65%) dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar 57,65%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

c. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III tahun 2021 mencapai 4 pelaku usaha. Rincian jumlah pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	CV. Sea Malaka	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Sea Malaka Trade terletak di Jl. Ampera Dusun 5 Bagan Asahan Pekan, Provinsi Sumatera Utara; - Perusahaan ini memiliki izin usaha dengan nomor : 8120206733812 serta termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang Pendinginan/Pengesan Ikan; - Adapun yang berpotensi menjadi sumber pencemaran adalah air limbah dari proses pengolahan produk - produk perikanan; - Perusahaan ini memiliki bak Kontrol kecil untuk menampung air limbah dan sisa produk sebelum di buang ke perairan; - UPI ini rutin melakukan uji air limbah tiap enam bulan ke Sucofindo dan uji terakhir dilakukan pada bulan Juni dan semua parameter yang diuji (Fisika,Kimia dan Biologi) berada di bawah nilai ambang batas.
2	PT. Halindo Berjaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Halindo Berjaya Mandiri terletak di Jl. Burhanuddin Lk.II, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara; - Perusahaan ini bergerak dalam bidang Pembekuan Ikan, telah memiliki dokumen perizinan usaha berupa SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha 8120101890393; - PT. Halindo Berjaya Mandiri telah memiliki IPAL dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<p>Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Nomor 503/178/IPAL-AP/PM-PPTSP-2020 dan hasil uji air limbah memiliki Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai baku mutu air limbah peraturan KLH No. 5 Tahun 2014;</p>
3	Koden Sirari	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan pencemaran dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 September 2021 di Usaha Pembudidayaan Ikan (KJA) milik Bapak Koden Sirari; - Usaha KJA bapak Koden Sirari ini merupakan usaha skala kecil dan tidak memiliki izin; - Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan pengamatan visual di keramba. Air pada keramba terlihat jernih dan pakan ikan yang digunakan merupakan jenis pakan apung sehingga meminimalisir endapan; - Pada kegiatan ini, dilakukan juga pengambilan sampel air dan akan dilakukan pemeriksaan kualitas perairannya melalui Laboratorium Sucofindo; - Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pengawas perikanan tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran di lokasi usaha. Pengawas merekomendasikan agar selalu dilakukan pengujian kualitas air secara rutin.
4	PT. Suri Tani Pemuka	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pengawasan adalah PT. Suri Tani Pemuka unit Tilapia Farm Tambun Raya yang berada di danau Toba, yaitu desa Pematang Tambun Raya, kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; - Perusahaan telah memiliki izin usaha dengan dengan Nomor Induk Berusaha 8120001702648; - Izin Lingkungan diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Simalungun nomor 188.45/501/10752/IL/BPPT/2015 - Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari BLH Kabupaten Simalungun melalui Surat Rekomendasi Nomor: 1168/Sekrt-2015; - Pengujian kualitas air di keramba yang terbaru dilakukan pada bulan Juli 2021. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 (dua) titik, yaitu BLH 1 (pada lokasi kerambah) dan BLH 2 (berjarak 50 meter dari

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		keramba). Pengujian kualitas air dilakukan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan yang merupakan UPT dari Kementerian Kesehatan. Hasil uji dari semua parameter tidak melebihi kadar maksimum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di lokasi usaha adalah baik (normal)

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.37.890.069 (41,41%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 91.500.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini sampai dengan TW III tahun 2021 telah tercapai 9 pelaku usaha dan anggaran yang digunakan masih rendah yaitu 41,41%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

d. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi yaitu 3 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi sebagaimana tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	Kelompok Tani Mekar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan di wisata mangrove Lubuk Kertang yang dikelola oleh Kelompok Tani Mekar; - Kelompok Tani Mekar yang merupakan pengelola kawasan mangrove telah menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan dengan KPH Wilayah I Stabat; - Luas ekosistem hutan mangrove Desa Lubuk Kertang adalah 1.200 ha dimana sebanyak 410 ha hutan bakau dikelola oleh Kelompok Tani Mekar dan sebanyak 96 ha dikelola oleh Kelompok Telukku Indah sedangkan sisanya sedang menunggu izin kemitraan kehutanan (KULIN KK); - Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Mekar adalah Peraturan Desa Lubuk Kertang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Kawasan Mangrove dan Peraturan Kepala Desa Lubuk Kertang NO. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM).
2	Abdul Maad	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Perikanan mengunjungi kawasan wisata Mangrove Mekar bahari yang berada di titik koordinat 3° 40' 45.3534" LU dan 98° 54' 57.0702" BT yang dikelola oleh Bapak Ma'ad; - Luasan mangrove di daerah ini sekitar 29,4 Ha menurut dan dimanfaatkan untuk wisata 19,6 Ha; - Kerusakan kawasan mangrove disebabkan oleh abrasi pantai.
3	Bapak Alamsyah	<ul style="list-style-type: none"> - Ekowisata mangrove Desa Insit merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh Bapak Alamsyah, karena lahan tersebut merupakan milik pribadi; - Bapak Alamsyah secara mandiri menanam mangrove di lahan miliknya, dan setelah belasan tahun mangrove tersebut tumbuh dan baru dimanfaatkan sebagai area ekowisata; - Luas lahan yang dimiliki Bapak Alamsyah 0,8 Ha dan hanya 0,02 Ha yang dimanfaatkan untuk ekowisata.

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
4	Desa Lemang	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan mangrove yang diawasi adalah Ekowisata mangrove Desa Lemang dan Desa Anak Setatah dikelola oleh pemerintah desa; - Area yang dijadikan ekowisata mangrove di Desa Lemang Hanya 0,5 H dari total luas lahan 3 H, sedangkan di Desa Anak Setatah, area yang dijadikan wisata mangrove sekitar 3 ha dari total mangrove 350 ha; - Ekowisata Mangrove Desa Lemang dan Ekowisata Cinta Mangrove Desa Anak Setatah merupakan usaha BUMDes yang secara legalitas telah disahkan melalui kepaladesa setempat;
5	Desa Anak Setatah	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan mangrove yang diawasi adalah Ekowisata mangrove Desa Lemang dan Desa Anak Setatah dikelola oleh pemerintah desa; - Area yang dijadikan ekowisata mangrove di Desa Lemang Hanya 0,5 H dari total luas lahan 3 H, sedangkan di Desa Anak Setatah, area yang dijadikan wisata mangrove sekitar 3 ha dari total mangrove 350 ha; - Ekowisata Mangrove Desa Lemang dan Ekowisata Cinta Mangrove Desa Anak Setatah merupakan usaha BUMDes yang secara legalitas telah disahkan melalui kepaladesa setempat;

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.38.987.700,- dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 48.000.000,- atau sebesar 81,22%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan 81,22%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia

dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

2. Sasaran Program 2: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**

Capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III tahun 2021 mencapai 96,29%. Capaian ini belum memenuhi target TW III tahun 2021 sebesar 100%, karena pada Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum semua dilakukan penginputan pada aplikasi Simwaskan. Terkendalanya penginputan pada aplikasi Simwaskan ini diakibatkan karena pada beberapa Satwas dan wilker belum mendukung jaringannya. Capaian pada TW III tahun 2021 ini lebih kecil bila di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2020 yaitu sebesar 100%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024.

Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran 4 (empat) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian	Persentase (%)
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	85,14	85,14%
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian	Persentase (%)
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		100	96,29	96,29%

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan” Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Juli sampai dengan September 2021. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 10 Berikut:

Tabel 10. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian kapal perikanan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW III Tahun 2021 sebanyak 1.721 unit kapal perikanan. Dari 1.721 unit kapal yang di periksa tersebut, pada TW III hanya sebanyak 442 kapal yang telah di lakukan penginputan ke aplikasi simwaskan sedangkan 1.279 unit kapal belum di lakukan penginputan pada aplikasi simwaskan karena adanya gangguan jaringan dimana pada beberapa satwas dan wilker, jaringan untuk melakukan input simwaskan ini belum mendukung. Berdasarkan perhitungan tahapan pemeriksaan tersebut diperoleh nilai sebesar 85,14%. Kapal perikanan yang tidak laik operasional pada Tahun 2021 di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 208.095.825,- atau sebesar 39,49 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar RP. 527.000.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggaran masih sebesar 39,49%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha

Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambah Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW III Tahun 2021 sebanyak 37 unit usaha UPI, dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2020, capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 30 Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria karena capaian pada tahun TW III tahun 2020 sebanyak 7 unit usaha UPI.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.82.396.056,- atau sebesar 34,04% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 242.083.000- (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggaran masih sebesar 34,04%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pengolahan hasil perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan

pengawasan pengolahan hasil perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengolahan hasil perikanan.

c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 12 Berikut:

Tabel 12. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit usaha Distribusi yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW III Tahun 2021 sebanyak 16 unit usaha Distribusi, dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2020, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 8 Unit usaha Distribusi, karena pada TW III tahun 2020 Unit usaha Distribusi yang di periksa sebanyak 8 pelaku usaha.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 53.166.000,- atau sebesar 39,13% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 135.857.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggarannya masih sebesar 39,13%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan distribusi hasil perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan.

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 13 Berikut:

Tabel 13. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,3	Berita Acara Hasil Pengawasan di Simwaskan

3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit usaha budidaya yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada TW III tahun 2021 sebanyak 26 unit usaha budidaya, dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2020, capaian ini mengalami penurunan sebanyak 38 Unit usaha Budidaya yang telah sesuai dengan kriteria karena capaian pada TW III tahun 2020 sebanyak 64 Unit usaha Budidaya.

Berdasarkan perhitungan tahapan pemeriksaan tersebut diperoleh nilai sebesar 100%. Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan perUndang-Undang di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 79.555.048,- atau sebesar 43,24% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 184.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah mencapai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggaran masih sebesar 43,24%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan.

3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat” di identifikasikan ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**.

Capaian IKU ke-3 “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target yang ditetapkan sebesar 71 %. Pada TW III Tahun 2021, belum terdapat informasi pengaduan yang disampaikan oleh POKMASWAS dan ditindaklanjuti, sesuai dengan cara perhitungan Manual IKU pada perencanaan tahun 2021 apabila tidak terdapat informasi/pengaduan dari POKMASWAS maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan laporan informasi/pengaduan bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi dengan demikian Capaian TW III terealisasi yaitu 71 %.

Capaian IKU Ke-3 Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III pada tahun 2021 dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW III pada tahun 2020. Pada tahun 2020 IKU TW III terealisasi 0% sementara pada TW III tahun 2021 terealisasi sebesar 71%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah Rp. 0,- (*belum ada penyerapan*) dari anggaran yang dialokasikan 12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan POKMASWAS, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha POKMASWAS di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas sebanyak 61 orang , dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan POKMASWAS.

4. Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program-4 “Terselenggaranya pemantauan SDKP” diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: IKU ke-4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; dan IKU ke-5 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun capaian dari Sasaran Program-4 dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14.Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada SDKP TW III Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			
		TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	1,8	1,09	1,71	120%
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,04	0,03	0,0324	108%

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Program-4 Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a. IKU ke-4 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 1,8 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan cakupan laut melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 ,Hiu 08 dan Hiu 16 pada periode TW III Tahun 2021, Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 109 hari operasi dengan dukungan Kapal pengawas sebanyak 3 Unit Kapal, yaitu KP. Hiu 01 ,Hiu 08 dan Hiu 16.

Capaian IKU ke-4 dapat dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2020, karena IKU ini terdapat pada TW III tahun 2020 dengan capaian sebesar 0,63% dan bila dibandingkan dengan Capaian TW III pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,08% dengan capaian 1,71%.

Berdasarkan hari operasi Pada Triwulan III tahun 2021 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh kapal pengawas seluas 33.068 nm² (*nautica mile*) atau sebesar 1,71% melebihi dari target TW III tahun 2021 yaitu sebesar 1,09%. Perhitungan tersebut dapat di lihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

CAKUPAN WPP NRI YANG DI PANTAU DENGAN KAPAL PENGAWAS LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

No	UPT PSDKP	No	Kapal Pengawas	Kelas	Total Hari	Jam Operasi (jam)	Kecepatan Dinas (NM/jam)	Jangkauan Efektif Radar (NM)	Cakupan Teoritis (CT) NM2	Area Operasi Utama	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan Aktual (CA) NM2	%Cakupan Aktual
1	Stasiun PSDKP Belawan	12	Hiu 01	D	102	1009,99	12	12	145.439	571	0,20	0,20	5.818	0,30
		13	Hiu 08	D	135	1664,41	12	12	239.675	571	0,20	0,20	9.587	0,50
		14	Hiu 16	C	90	981,28	15	15	220.788	571	0,20	0,40	17.663	0,92
Total									385.114				33.068	1,71

Gambar 2. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan Patroli oleh 3 (tiga) unit kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.536.802.791,- atau sebesar 77,31% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.508.668.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target pada TW III beserta kegiatan utama dengan didukung realisasi anggaran 38,43%.

b. IKU Ke – 5 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 0,04 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024.

Apabila di bandingkan dengan Capaian IKU pada TW III tahun 2020, maka capaian pada TW III tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,0108% karena capaian IKU ini pada TW III tahun 2021 sebesar 0,0324% sedangkan capaian IKU ini pada TW III tahun 2020 sebesar 0,0216%. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi *Speedboat* pengawasan. Pada periode TW III tahun 2021, Operasi *Speedboat* pengawasan dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 12 hari operasi dengan dukungan *Speedboat* pengawasan sebanyak 1 Unit *Speedboat* yaitu Dolphin 014. Berdasarkan hari operasi pada TW III Tahun 2021 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh *Speedboat* sebesar 0,0324 % dari Target TW III Tahun 2021 yaitu sebesar 0,03% dengan presentase capaian 108%.Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* dijelaskan pada gambar 3 berikut:

CAKUPAN WPP NRI YANG DI PANTAU DENGAN SPEEDBOAT LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

No.	NAMA KAPAL	Lokasi Penempatan	Jangkauan Pemantauan Visual (NM)	Kecepatan (NM/Jam)	Hari Operasi (hari)	Lama Waktu Pengawasan (jam)	Faktor Koreksi Speedboat (Fsb)	Cakupan (Xsb) (NM2)	Luas WPP NRI (NM2)	Cakupan (%)
			d	v		t	Fsb	$d*v*t*Fsb$	A	X/A
1	Dolphin 14	Stasiun PSDKP Belawan	4	10	24	156	0,1	624	1.928.506	0,0324%

Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 97.937.840 atau 57,10% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.171.530.000,- untuk Dolphin 014. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai sesuai target dan realisasi anggarannya masih 57,10%.

5. Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” di Identifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: IKU ke 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, IKU ke 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dan IKU ke 8 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana

Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” . Adapun capaian dari Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
2	Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	0	0
3	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	0	0

Penjelasan IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” adalah sebagai berikut:

a. IKU 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.

IKU 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan” merupakan IKU baru dengan target yang telah ditetapkan pada TW III tahun 2021 sebesar 100%. Pembangunan kapal Pengawas tersebut telah di laksanakan sejak tahun 2020 dengan menggunakan sistem Multiyears dan di targetkan selesai 100% pada Bulan Maret 2021. Pada TW III tahun 2021, IKU ini telah tercapai sebesar 100%, dimana pembangunan kapal pengawas kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan telah selesai. Capaian ini di dukung dengan telah di tanda tangannya Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 056/Sta.2/PL.430/IIII/2021 tanggal 5 Maret 2021 antara PT. Palindo Marine sebagai penyedia jasa dengan Stasiun PSDKP Belawan sebagai pengguna jasa . IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2020, karena IKU ini baru ada pada tahun 2021. Adapun capaian dari IKU 6 pada Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2021	Realisasi	Persentase (%)
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.815.996.950,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau sebesar 99,87% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.832.600.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama dengan realisasi anggarannya tercapai 93%.

b. IKU 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Dalam rangka pencapaian IKU 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) data dukung yaitu: Terselenggaranya pembangunan kantor pengawasan SDKP di Satwas Langsa. Adapun Capaian IKU Ke-7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 97. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
	TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100%	0	0

Penjelasan Pencapaian IKU Ke-7 dari Sasaran Program - 5 sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah jumlah Prasarana Pengawasan SDKP yang selesai dibangun dibandingkan dengan target kegiatan pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Prasarana Pengawasan yang akan di bangun Stasiun PSDKP Belawan adalah pembangunan kantor pengawasan SDKP Satwas Langsa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian pembangunan sebesar 100%. Pada TW III Tahun 2021 IKU Ke-7 belum dapat dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2021 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan bangunan Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 354.705.400,- atau 29,31% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.210.292.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

c. IKU 8 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”

Capaian IKU Ke-8 ” Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 108.Capaian IKU “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		
	TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN
Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100%	0	0

Penjelasan Pencapaian IKU Ke-8 dari Sasaran Program 5 sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP

Belawan meliputi: 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit (*Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat*).

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada TW III Tahun 2021 IKU Ke-8 belum dapat dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2021 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.330.605.686,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 42,06% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.163.443.000,- (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

6. Sasaran Program 6 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program ke 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: (1) IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			
		TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	65	98,75	120
2	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	93%	50	96,88	120

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			
		TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	% CAPAIAN
	TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Program - 6 sebagai berikut:

a. IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Pada TW III tahun 2021 IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki target sebesar 65% dengan capaian pada TW III Tahun 2021 sebesar 98,75% atau realisasi sebesar 120%. Capaian tersebut di dapatkan dari proses administrasi atau pun penyidikan 16 kapal yang di tangkap oleh Stasiun PSDKP Belawan. Adapun ke 16 kapal yang di tangkap oleh Stasiun PSDKP Belawan pada TW III tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Data kasus TPKP yang di tangani Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2021.

No.	Nama Kapal	Nama Tersangka	Kebangsaan Kapal	Kewarganegaraan Tersangka	Tanggal Tertangkap	Keterangan
1.	KM. PKFB 1845	Baharuddin Lubis	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020	Inkracht
2.	KM. SLFA 5177	Andika	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020	Inkracht
3.	KM. SLFA 5227	Sutikman	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020	Inkracht
4.	KM. SLFA 4107	Taung Htike	Malaysia	Myanmar	24 Januari 2021	Inkracht
5.	KM. SLFA 5165	Rasim	Malaysia	Indonesia	25 Januari 2021	Inkracht
6.	KM. SLFA 5170	Darwis Siregar	Malaysia	Indonesia	25 Januari 2021	Inkracht
7.	KM. KHF 2559	Teht Zin Hein	Malaysia	Myanmar	3 Februari 2021	Inkracht

8.	KM. PKFB 1731	Paidi	Malaysia	Indonesia	24 Maret 2021	Inkracht
9.	KM. PKFB 423	Sutikno	Malaysia	Indonesia	24 Maret 2021	Inkracht
10	KM. PKFA 8487	Lee Kian Heng	Malaysia	Malaysia	17 April 2021	Inkracht
11	KM. KHF 1937	Samarth Thongmak	Malaysia	Thailand	7 Mei 2021	Persidangan
12	KM. SLFA 3802	Wona	Malaysia	Myanmar	8 Mei 2021	Persidangan
13	KM. SLFA 4598	Aung Wing / Win Soe	Malaysia	Myanmar	11 Juni 2021	Persidangan
14	KM. PKFB 1472	Myo Zaw Htun	Malaysia	Myanmar	12 Juni 2021	Persidangan
15	KM. SLFA 5124	Naing Naing	Malaysia	Myanmar	18 Juli 2021	Persidangan
16	KM. PK 6911 F	Soe Hlaing als Nyi Nyi	Malaysia	Myanmar	6 September 2021	SPDP

Adapun proses perhitungan pencapaian IKU tersebut adalah seperti pada gambar 4 berikut:

Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP											
No	Nama Kapal	Tanggal Tertangkap	Nama Tersangka	Kelengkapan Berkas Penilaian / Data Dukung						Total Nilai	
				Gelar Perkara Awal (Undangan dan Laporan Perkara Awal)	Sprindik	SPDP	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Tanda terima Penyerahan Tahap I, BA serah terima berkas perkara	Surat P-21 Dari Kejaksanaan		Berita Acara Tahap II
				5	30	15	30	15	3	2	
1	KM. PKFB 1845	30 Desember 2020	Baharuddin Lubis	5	30	15	30	15	3	2	100
2	KM. SLFA 5177	30 Desember 2020	Andika	5	30	15	30	15	3	2	100
3	KM. SLFA 5227	30 Desember 2020	Sutikman	5	30	15	30	15	3	2	100
4	KM. SLFA 4107	24 Januari 2021	Taung Htike	5	30	15	30	15	3	2	100
5	KM. SLFA 5165	25 Januari 2021	Rasim	5	30	15	30	15	3	2	100
6	KM. SLFA 5170	25 Januari 2021	Darwis Siregar	5	30	15	30	15	3	2	100
7	KM. KHF 2559	3 Februari 2021	Teht Zin Hein	5	30	15	30	15	3	2	100
8	KM. PKFB 1731	24 Maret 2021	Paidi	5	30	15	30	15	3	2	100
9	KM. PKFB 423	24 Maret 2021	Sutikno	5	30	15	30	15	3	2	100
10	KM. PKFA 8487	17 April 2021	Lee Kian Heng	5	30	15	30	15	3	2	100
11	KM. KHF 1937	7 Mei 2021	Samarth Thongmak	5	30	15	30	15	3	2	100
12	KM. SLFA 3802	8 Mei 2021	Wona	5	30	15	30	15	3	2	100
13	KM. SLFA 4598	11 Juni 2021	Aung Wing / Win Soe	5	30	15	30	15	3	2	100
14	KM. PKFB 1472	12 Juni 2021	Myo Zaw Htun	5	30	15	30	15	3	2	100
15	KM. SLFA 5124	18 Juli 2021	NAING NAING	5	30	15	30	15	3	2	100
16	KM. PK 6911 F	6 Sep 2021	Soe Hlaing als. Nyi Nyi	5	30	15	30	15	3	2	100
TOTAL NILAI TW III										1580	
Keterangan :		Belum Ada									
NILAI PENYELESAIAN TPKP				98,75							

Gambar 4. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian TW III tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. Realisasi atau sebesar Rp.325.128.764 atau 54,09%,- dari total anggaran Rp. 642.375.000,-

b. IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pada TW III tahun 2021 IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) memiliki target 50% dengan capaian sebesar 96,88% atau realisasi 120%.

IKU ke-10 tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian TW III tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.260.567.310,- atau 52,07% dari total anggaran Rp.260.567.310,-

7. Sasaran Program - 7 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program- 7 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” telah mengidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh) IKU, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (6)Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (7) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (9)Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan); (10) Nilai I Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Program 7 sebagai berikut:

(1) IKU 11 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pemenuhan Dokumen Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada TW III Tahun 2021 terealisasi dengan nilai indeks sebesar 91,24 atau 114,05% dari

target TW III tahun 2021 yaitu dengan nilai Indeks 80. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada Semester IV Tahun 2020. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO TW III Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat di lihat pada tabel 20 berikut

Tabel 21. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO TW III Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,683
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,617
U3	Waktu Pelayanan	3,650
U4	Biaya / Tarif	4,000
U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,600
U6	Kompetensi Pelaksana	3,467
U7	Perilaku Pelaksana	3,517
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,850
U9	Sarana dan Prasarana	3,850
Nilai Indeks		3,650
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)		91,24

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali sehingga sampai dengan periode ini IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan terealisasi dengan nilai indeks sebesar 91,24.

(2) IKU 12 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian IKU Ke-12 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna LVHPI pada Triwulan III Tahun 2021 tercapai 90,2 dari target yang telah ditetapkan pada TW III tahun 2021 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 112,75%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan

capaian pada TW III tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada Tahun 2021. Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI TW III Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,400
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,600
U3	Waktu Penyelesaian	3,700
U4	Biaya / Tarif	4,000
U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,300
U6	Kompetensi Pelaksana	3,700
U7	Perilaku Pelaksana	3,700
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,400
U9	Sarana dan Prasarana	4,00
Nilai Indeks		3,608
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)		90,20

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali dan sampai dengan periode ini IKU LVHPI terealisasi. Sebesar 90,20.

(3) Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Penilaian untuk IKU Ke-13 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada periode TW III tahun 2021 IKU ke-13 belum ada capaian, IKU ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 75 pada TW IV tahun 2021.

(4) IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 73. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *assessment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *fingger print*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan III Tahun 2021 capaian IKU indeks Profesional ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada Skor. IKU Ke-14 ini diukur per semester yaitu dengan perhitungan pada Semester I dengan target 65 dan Semester II dengan target 73 pada tahun 2021.

(5) IKU ke-15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90, IKU ini merupakan IKU baru yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro perencanaan KKP. Pada TW III tahun 2021 IKU ke-15 belum ada capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2021 dengan target nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 90.

(6) IKU Ke-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Ke-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian kinerja untuk IKU Ke-15 pada periode TW III tahun 2021 belum dapat diukur/ dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IIIV tahun 2021 dengan target nilai 72,5 %.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.20.315.447,- atau sebesar 24,52% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 82.850.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini akan tercapai 100% pada akhir tahun 2021 sesuai target beserta kegiatan utama namun realisasi anggarannya s.d TW III yaitu sebesar 24,52%.

(7) IKU Ke-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan%

IKU Ke-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian kinerja untuk IKU Ke-17 pada periode TW III tahun 2021 belum dapat diukur/ dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IIIV tahun 2021 dengan target nilai 72,5 %.

(8) IKU Ke-18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 84% pertriwulan pada tahun 2021. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III tahun 2021 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW III sebesar 98,89% melebihi dari target yang di tetapkan pada TW III yaitu sebesar 84%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW III tahun 2020, IKU Ke-18 ini mengalami penurunan sebesar 1,11% dengan capaian sebesar 100% pada TW III tahun 2020. Penurunan persentase capaian tersebut terjadi pada item Keikutsertaan, dimana pada TW III tahun 2021 nilai keikutsertaan Stasiun PSDKP Belawan sebesar 94,44% sedangkan pada TW III tahun 2020, nilai keikutsertaan nya mencapai nilai 100%. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat diliha pada gambar 5 berikut:

3. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Satker UPT PSDKP pada Triwulan III 2021, sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	TARGET	RELISASI			CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	
1	JAKARTA	84%	96.11%	100.00%	100.00%	98.70%
2	BITUNG	84%	100.00%	100.00%	98.00%	99.33%
3	LAMPULO	84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	BATAM	84%	62.22%	98.89%	98.89%	86.67%
5	BENOA	84%	53.33%	100.00%	96.11%	83.15%
7	TUAL	84%	92.22%	100.00%	100.00%	97.41%
6	BELAWAN	84%	98.89%	98.89%	98.89%	98.89%
8	PONTIANAK	84%	97.78%	97.78%	95.78%	97.11%
9	TARAKAN	84%	79.89%	95.56%	100.00%	91.82%

Gambar 5. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(9) IKU Ke-19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

IKU ke-19 akan dilakukan pengukuran pada tiap semester, dengan target yang ditetapkan pada Semester I sebesar 80% dan Semester II sebesar 89% pada tahun 2021.

(10) IKU Ke-20 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

IKU ke-20 pada periode TW III tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada TW III tahun 2020, kaena IKU ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. IKU ini akan diukur kinerjanya pada TW IV tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86.

Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2021 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2021 tanggal 13 November 2020, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 52.078.585.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada tanggal 16 Februari 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi menjadi Rp. 52.065.525.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2021 tanggal 16 Februari 2021. Pada tanggal 04 Mei 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi dari Rp. 52.065.525.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu

Rupiah) menjadi Rp. 53.055.607.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Pada tanggal 13 Agustus 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi dari Rp. 53.055.607.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 49.438.013.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2021 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Triwulan III 2021 sebesar 76,77 % atau sebesar Rp 37.951.614.828,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 49.438.013.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 23. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – September 2021

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi armada	34.984.133.000	28.196.548.667	80,60
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	1.246.812.000	616.076.997	49,41
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	267.000.000	169.343.583	63,42
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.088.940.000	423.212.919	38,86
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.851.128.00	8.546.432.662	72,11
Jumlah		49.438.013.000	37.951.614.828	76,77

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2021 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2021, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
5. Melaksanakan perbaikan speedboat Napoleon 028 pada tahun 2022.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
4. Mengajukan anggaran perbaikan speedboat Napoleon 028 pada pagu indikatif anggaran Tahun 2022.